



Peran UN Women dalam Menanggulangi Diskriminasi terhadap Perempuan di Republik Demokratik Congo (RDK) pada Tahun 2017-2020

Natasha Kusuma Dewi¹, Sugito²

^{1,2}Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Email: natasha.k.isip19@mail.umy.ac.id¹, sugito@umy.ac.id²

Abstrak

Terlepas dari tekanan internasional yang terus berlanjut, pemerintah Congo belum mengatasi kesenjangan kewajibannya untuk mengatasi kekerasan berbasis gender. Terlebih lagi, diskriminasi dialami oleh perempuan dan anak perempuan Congo. Pengalaman tersebut menjadikan UN Women sebagai salah satu anak organisasi PBB untuk bertindak mengatasi diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di Republik Demokratik Congo (DRC). Kajian ini bertujuan untuk mengkaji peran UN Women dalam mengatasi diskriminasi terhadap perempuan di DRC selama periode 2017 hingga 2020. Kajian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa UN Women sebagai LSM memiliki peran dalam menghapuskan diskriminasi yang terjadi di DRC selama 2017-2020, meski belum sepenuhnya hilang. Selain itu, UN Women juga menjalankan perannya sebagai NGO dengan strategi Transnational Advocacy Network dengan menerapkan Politik Informasi, Politik Simbolik, Politik Leverage, dan Politik Akuntabilitas.

Kata Kunci: *UN Women, Diskriminasi, DRC*

Abstract

Despite continued international pressure, the Congolese government has not addressed the gap in its obligations to address gender-based violence. Moreover, discrimination is experienced by Congolese women and girls. This experience makes UN Women one of the subsidiary organizations of the United Nations to act to overcome discrimination against women that occurs in the Democratic Republic of the Congo (DRC). This study aims to review the role of UN Women in overcoming discrimination against women in the DRC during the period 2017 to 2020. This study uses a descriptive method with qualitative analysis. The results of this study show that UN Women as an NGO has a role in eradicating discrimination that occurred in the DRC during 2017-2020, although it has not entirely disappeared. In addition, UN Women also carries out its role as an NGO with the Transnational Advocacy Network strategy by implementing Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, and Accountability Politics.

Keywords: *UN Women, Discrimination, DRC*

PENDAHULUAN

Republik Demokratik Congo (RDK) adalah negara terbesar kedua di Afrika dan memiliki total populasi 67,8 juta orang, di mana 51% adalah wanita dan 48% dari total populasi berusia di bawah 15 tahun. Meskipun memiliki sumber daya yang melimpah, RDK menjadi salah satu negara termiskin di dunia, diklasifikasikan ke 186 dari 187 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia. Lebih dari 70% populasi hidup di bawah ambang kemiskinan.

Konflik bersenjata selama beberapa dekade menyebabkan kematian lebih dari 2 juta warga sipil dan diperkirakan lebih dari 1 juta wanita mengalami pemerkosaan. Meskipun pasal 5, 14 dan 15 konstitusi RDK menetapkan dasar hukum atas kebijakan dan kesetaraan, level perempuan saat ini hanya menempati 7,2% posisi di tingkat pengambilan keputusan tertinggi di tingkat nasional di parlemen dan pemerintah.

Diketahui sebanyak 52% wanita di RDK adalah penyintas KDRT dan 39% wanita Kongo melaporkan telah diancam atau dilukai. Sebanyak 27% perempuan di RDK menjadi korban praktik tradisional yang berbahaya. Pernikahan di bawah umur adalah hal yang lumrah, menurut data pada 2007 terdapat 39% wanita di awal usia dua puluhan menikah atau menikah sebelum usia 18 tahun. Meskipun sudah ada tekanan internasional yang terus menerus, pemerintah Kongo belum mampu mengatasi celah dalam kewajibannya untuk mengatasi kekerasan berbasis gender dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan di Kongo. Meskipun dalam laporan berkala ke-8 yang disampaikan oleh Pemerintah RDK kepada Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite) menyatakan bahwa undang-undang tentang kesetaraan gender dan pemenuhan hak telah “berkembang secara signifikan”.

Sebagai salah satu langkah untuk mencapai kesetaraan gender secara penuh dalam salah satu bentuk 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), UN Women di Republik Demokratik Kongo (RDK) telah membuka kantor di bawah kepemimpinan Perwakilan Negara dan Wakil Perwakilan Negara, yang telah diangkat ke posisinya masing-masing pada Januari 2012 dan Oktober 2012. Sampai dengan 31 Desember 2012, Kantor tersebut masih dalam masa transisi dari Kantor Program (bertanggung jawab langsung ke Kantor Regional Afrika Tengah Wanita PBB) menjadi Kantor Negara. Kantor tersebut terdiri dari 11 personel, 4 di antaranya berada di Sub-kantor di Bukavu. Selain itu, hal ini juga merupakan salah satu bentuk tindakan atas komunitas internasional yang telah mengakui pelanggaran terus-menerus terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan di RDK dan mengutuk pemerkosaan dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual dan berbasis gender yang sistematis.

Penelitian sebelumnya oleh menunjukkan bahwa upaya UN Women untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di RDK (2011-2018) dengan beberapa langkah antara lain pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan perempuan, politik dan kepemimpinan perempuan, serta memberi dukungan terhadap perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Selain itu, Kharima dalam penelitiannya juga menemukan bahwa dalam periode 2015-2017, terdapat peran UN Women antara lain dengan mendukung organisasi regional serta menjalin kerjasama dengan aktor internasional. Selain itu, UN Women juga bekerjasama dengan WHO dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Kerjasama antara UN Women dengan World Bank menghasilkan pemulihan infrastruktur terutama dalam aspek kesehatan, seperti rumah sakit. Penyebarluasan kampanye mengenai hak-hak perempuan juga dilakukan oleh kerjasama antara UN Women dengan organisasi internal RDK yaitu Peace and Society Council (PSC).

Maka, tujuan dari penelitian ini adalah mengulas peran dari UN Women dalam menanggulangi diskriminasi pada perempuan yang terjadi di RDK selama masa periode 2017 hingga 2020. Selain itu, peneliti berargumen bahwa dalam perannya selama periode tersebut, UN Women sebagai NGO mempunyai peran yang mampu mengentaskan diskriminasi yang terjadi di RDK selama 2017-2020.

METODE

Data statistik dengan jelas menunjukkan ketidaksetaraan gender di RDK. Indeks Pembangunan Gender adalah 0,833, yang berarti bahwa pembangunan sumber daya manusia untuk laki – laki adalah sekitar 83% dibanding perempuan. Perbedaan muncul dari indikator yang rendah pada pendidikan dan kesehatan daripada pendapatan. Maka, berdasarkan referensi jurnal sebelumnya oleh Ardi yang meneliti pada periode 2011-2018, penelitian ini menggunakan periode selanjutnya dimulai dari 2017-2020.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari sumber-

sumber seperti buku, jurnal, dokumentasi dari UN, hingga berita dan laporan dari internet mengenai UN Women dan perannya dalam mengatasi diskriminasi wanita di RDK.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif sementara dalam pengolahan datanya menggunakan teknik kualitatif, yakni peneliti membeberkan dan memberikan penjelasan pada data yang ada secara berurutan pada waktu yang ada kemudian menghubungkan data antara satu sama lain yang ditarik kesimpulannya menggunakan kerangka teori yang sebelumnya digunakan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2017, Wakil Ketua PBB bergabung di RDK oleh Direktur Eksekutif Wanita PBB Phumzile Mlambo-Ngcuka, Perwakilan Khusus PBB untuk Kekerasan Seksual dalam Konflik Pramila Patten, dan Utusan Khusus Uni Afrika (AU) untuk Perempuan, Perdamaian dan Keamanan Bineta Diop. Menurut UN Women, upaya pemerintah dalam memerangi kekerasan seksual berbasis gender memiliki catatan bahwa perempuan yang memiliki tanggungjawab pekerjaan mungkin menjadi alasan kemajuan mereka, tetapi hal tersebut tidak membuat mereka berkembang lebih jauh.

Selain itu, pada 2017 UN Women mampu membantu dalam kasus terpidana pengadilan nasional Frederic Batumike, seorang wakil dari provinsi Kivu Selatan Republik Demokratik Congo, dan 11 anggota milisi pribadinya pada bulan Desember yang dijatuhi hukuman seumur hidup atas pembunuhan dan pemerkosaan 37 anak kecil di Kavumu. Hukuman tersebut merupakan pertama kalinya seorang pejabat pemerintah yang menjabat di RDK dinyatakan bersalah atas tanggung jawab yang lebih tinggi dan merupakan momen bermerek dalam perjuangan melawan impunitas atas kekerasan seksual di negara tersebut.

Pada tahun 2018, Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan telah menerbitkan hasil investigasi mengenai negara-negara yang diperiksa selama periode ke-71 dari 22 Oktober hingga 9 November di Jenewa: Bahama, Kongo, Republik Demokratik Rakyat Laos, Mauritius, Nepal, Samoa, Tajikistan, dan bekas Republik Yugoslavia Makedonia. Namun tidak tercatat ada program signifikan yang dilaksanakan oleh UN Women.

Pada tahun 2019, Komite PBB mengamanatkan non-diskriminasi berdasarkan gender dalam perekrutan secara hukum di tujuh negara, termasuk Cabo Verde, Pantai Gading, Republik Demokratik Congo, Guinea-Bissau, Liberia, Mali dan Niger. Selain itu, dibentuk juga organisasi wanita *Dynamique Nationale des Femmes* yang memiliki 3.000 anggota perempuan yang bekerja untuk mempromosikan partisipasi politik perempuan – diluncurkan di Gombe, Republik Demokratik Congo, pada 17 Mei 2019. *Dynamique Nationale des Femmes* dibentuk dengan tujuan mendukung dan mendampingi calon perempuan untuk pemilu berikutnya. Organisasi tersebut diprakarsai oleh UN Women, berkoordinasi dengan UNDP dan dengan dukungan tambahan dari Kanada. Anggota organisasi tersebut dan anggota Organisasi Nasional Pemimpin Wanita Afrika menciptakan kurikulum pelatihan Wanita PBB, menghasilkan lebih dari 300 pelatih yang siap melatih para perempuan. Selain itu, lebih dari 300 deputi telah terpilih di tingkat provinsi, ditambah dengan dukungan menteri yang memperkuat kapasitas mereka terkait dengan penyetaraan gender dalam pekerjaan dalam parlemen provinsi dan pemerintah daerah melalui program pelatihan multidisiplin dua bulan yang dirancang dan dilaksanakan oleh UN Women, UNDP dan Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Republik Demokratik Wanita PBB dari Kongo mendukung misi solidaritas dengan Kantor Utusan Khusus dengan menyelenggarakan Konferensi Internasional di Wilayah Great Lakes dan Uni Afrika dari 9 hingga 12 Juni 2019. Catherine Samba-Panza, mantan interim Presiden Republik Afrika Tengah dan *co-chairperson FemWise-Africa*, memimpin misi dan menyuarakan perlunya meninjau kebijakan dan undang-undang lokal yang mengandung ketentuan diskriminatif, sehingga memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam urusan politik. Kantor Perwakilan Negara Republik Demokratik Wanita PBB dari Kongo terlibat aktif dalam semua pertemuan mengenai revisi Rencana Strategis Nasional untuk Pembangunan dan berhasil mengadvokasi untuk

memasukkan isu-isu gender. Selanjutnya, UN Women mendukung pemerintah dalam mengembangkan rencana operasional yang dirancang untuk mengimplementasi generasi kedua dari rencana aksi nasional UNSCR 1325. Selain itu, Republik Demokratik Congo telah menandatangani adendum yang memungkinkan negara tersebut melakukan pengembangan rencana dengan Kepolisian Nasional Congo untuk menangani dan menanggapi kekerasan seksual terkait konflik, yang tidak lagi dilihat sebagai akibat yang tak terhindarkan dari konflik bersenjata tetapi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Mengingat konteks Republik Demokratik Congo saat ini, pemerintah telah berfokus untuk memastikan bahwa kekerasan seksual terkait konflik dimasukkan sebagai tindakan yang dilarang dalam persyaratan gencatan senjata dan perjanjian damai.

Kemudian di tahun 2020 masih tercatat lebih dari 35.000 kasus kekerasan seksual, mayoritas berada di wilayah Timur. Selama epidemi COVID-19, kekerasan meningkat 99% di Provinsi Kivu Utara. Menyikapi situasi tersebut, Wakil Menteri Perencanaan dan Menteri Negara Gender, Keluarga dan Anak meluncurkan revisi baru Strategi Nasional Pemberantasan Kekerasan Berbasis Gender (SNVGB) pada Kamis, 27 Agustus 2020 di Kinshasa. Dalam hal ini, Ms. Awa Ndiaye Seck, UN Women's Resident Representative di RDK, memiliki hak istimewa untuk berbicara selama acara tersebut. Dengan dukungan Direktur Eksekutif UN Women, dia menyerukan keterlibatan semua wanita, anak perempuan, pria dan anak laki-laki dalam pelaksanaannya, sehingga revisi baru ini adalah "strategi seluruh penduduk Congo dalam keragamannya". Acara ini mengakhiri proses yang dimulai pada tahun 2015 dengan bantuan Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, koordinasi UN Women dan dukungan dari banyak mitra seperti Kanada dan Swedia. Selama proses tersebut, banyak konsultasi diadakan dengan para korban dan penyintas di berbagai wilayah RDK, serta organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam perang melawan *Gender Based Violence* (GBV), NGO, lembaga publik dan mitra teknis dan keuangan.

Peran UN Women sebagai NGO

Sebelum menjabarkan bagaimana peran UN Women pada penuntasan diskriminasi wanita di RDK, maka perlu dibedah apa itu UN Women dan apa saja perannya sebagai NGO. UN Women adalah bagian dari PBB yang memiliki wewenang untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan didirikannya UN Women adalah mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan perempuan di seluruh dunia. UN Women memberikan dukungan terhadap negara-negara yang menerapkan standar global untuk masalah kesetaraan gender, dan negara yang menjalin kerjasama dengan masyarakat sipil dalam merancang kebijakan, program maupun layanan untuk memastikan bahwa standar tersebut dilakukan secara efektif dan memberikan manfaat.

Untuk mewujudkan visi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, UN Women bekerja secara global dengan berfokus pada empat prioritas, yakni:

- a. Perempuan menjadi pemimpin, ikut serta berkontribusi dan mendapatkan manfaat yang sama dari sistem pemerintahan.
- b. Perempuan terjamin atas pendapatan, pekerjaan yang layak dan otonomi ekonomi.
- c. Semua perempuan menjalani kehidupan yang bebas dari segala bentuk kejahatan dan kekerasan.
- d. Perempuan bisa memberikan kontribusi serta dapat lebih berpengaruh untuk pembangunan perdamaian dan ketahanan yang berkelanjutan. Dan berhak atas manfaat yang sama dari pencegahan bencana alam dan konflik serta aksi kemanusiaan.

UN Women juga berperan dalam koordinasi dan melakukan kampanye kerja PBB dalam memajukan kesetaraan gender, serta semua pertimbangan dan kesepakatan yang terkait dengan Agenda 2030. Dengan tujuan inti adalah menjadikan kesetaraan gender salah satu hal mendasar pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan dunia yang lebih inklusif.

Selain itu, UN Women mengusulkan transparansi pembiayaan publik, termasuk menjadikan anggaran

responsif gender yang mengalirkan sumber daya memadai untuk perempuan maupun laki-laki. Hal ini dapat diperkuat dengan terlibatnya advokat kesetaraan gender untuk membantu keterampilan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan publik dan meminta pertanggung jawaban pemerintah.

Dalam Majelis Umum PBB, dalam pembahasan mengenai status perempuan, UN Women menjadi peran sentral dalam mendukung kerangka kerja normatif yang lebih kuat untuk kebijakan kesetaraan gender dan memperkuat kapasitas sektor publik.

Selain itu, UN Women bekerjasama dengan banyak mitra dalam melakukan kampanye tentang kemampuan perempuan agar mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam setiap program pemberdayaan ekonomi, UN Women berusaha merangkul setiap perempuan yang dinilai membutuhkan, juga sering mengajak mereka bergabung dengan organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat. Dalam hal ini termasuk kelompok terpinggirkan seperti perempuan pedesaan, pekerja rumah tangga, migran, dan perempuan berkebutuhan khusus. Tujuannya adalah untuk memiliki pendapatan lebih tinggi, akses lebih baik, dan kontrol atas sumber daya dan keamanan yang lebih besar termasuk perlindungan dari kekerasan.

Peran UN Women pada diskriminasi di RDK

Dari data yang didapatkan dari tahun 2017-2020, diketahui bahwa UN Women sebagai NGO Internasional telah melakukan beberapa upaya untuk mengusut isu kekerasan terhadap perempuan. Sesuai dengan kesepakatan internasional yaitu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women dan yang tercantum pada UN Declaration on the Elimination of Violence against Women tahun 1993, UN Women menjalin kerjasama bersama negara-negara di tingkat global untuk melancarkan rencana normatif internasional melalui dukungan yang diberikan kepada lembaga antar pemerintah, seperti General Assembly dan CSW (Commission on the Status of Women). Lembaga CSW merupakan badan antar pemerintah global yang memiliki tugas spesifik dalam mengkampanyekan gender dan pemberdayaan perempuan. Sedangkan pada level negara, UN Women memberi dukungan pada pemerintah dalam menggunakan dan menerapkan reformasi hukum yang sefrekuensi dengan standar internasional.

Hal ini cukup ditunjukkan pada program yang dijalankan selama 2017 hingga 2020. Meskipun pada tahun 2018 tidak ada program yang signifikan, namun program pada tahun lain juga telah membuktikan bahwa peran UN Women terhadap diskriminasi perempuan di RDK terbukti ada.

Dalam tahun 2017, UN Women memberikan bantuan dalam kasus terpidana pengadilan nasional Frederic Batumike, seorang wakil dari Republik Demokratik Provinsi Kivu Selatan Congo, dan 11 anggota milisi pribadinya pada bulan Desember untuk hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembunuhan dan pemerkosaan dari 37 anak muda di Kavumu adalah bentuk UN Women sebagai NGO yang berperan sebagai Transnational Advocacy Network (TAN), yang menurut Margareth Keck dan Kathryn Sikkink merupakan aktor yang bergerak dalam skala internasional pada suatu masalah, para aktor ini dipersatukan oleh nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan pertukaran informasi serta bantuan yang kuat.

Organisasi Dynamique Nationale des Femmes Candidate and The UN Women Democratic Republic of the Congo Country Office yang telah aktif terlibat dalam semua pertemuan mengenai revisi Rencana Strategis Nasional untuk Pembangunan serta berhasil mengadvokasi penyertaan isu gender di tahun 2019 dan dukungannya pada Deputi Menteri Perencanaan dan Menteri Negara Gender, Keluarga dan Anak meluncurkan revisi baru Strategi Nasional Pemberantasan Kekerasan Berbasis Gender (SNVGB) pada Kamis, 27 Agustus 2020 di Kinshasa merupakan salah satu bentuk bagaimana UN Women sebagai NGO mampu berperan sebagai Jaringan Advokasi Transnasional.

Jika ditelaah menurut strategi politik Keck dan Sikkink, UN Women melakukan Information Politics, Symbolic Politics, dan Leverage Politics untuk mengatasi diskriminasi pada perempuan di RDK.

Dalam strategi Information Politics, UN Women berperan menyebarkan pemahaman mengenai

emansipasi dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di RDK, dimana contoh nyatanya adalah ketika Awa Ndiaye Sek, Perwakilan Residen Wanita PBB di RDK, memiliki hak istimewa untuk berbicara selama acara tersebut. Melaporkan dorongan Direktur Eksekutif UN Women, dia menyerukan keterlibatan semua wanita, anak perempuan, pria dan anak laki-laki dalam pelaksanaannya, sehingga revisi baru ini adalah "strategi seluruh penduduk Congo dalam keragamannya". Acara ini mengakhiri proses yang dimulai pada tahun 2015 dengan bantuan Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, koordinasi UN Women dan dukungan dari banyak mitra seperti Kanada dan Swedia.

Dalam strategi Symbolic Politics, salah satu peran yang dilakukan oleh UN Women adalah dukungannya terhadap langkah yang diambil oleh Kantor Negara Republik Demokratik Congo Wanita PBB yang terlibat aktif dalam semua pertemuan mengenai revisi Rencana Strategis Nasional untuk Pembangunan dan berhasil mengadvokasi pencantuman isu gender.

Kemudian pada Leverage Politics, UN Women memperkuat diri dengan menggandeng pemerintah lokal seperti mendukung Deputi Menteri Perencanaan dan Menteri Negara untuk Gender, Keluarga dan Anak menciptakan revisi kebijakan baru dalam Strategi Nasional untuk Memerangi Kekerasan Berbasis Gender (SNVGB).

Sementara pada Accountability Politics, UN Women terus mengikuti perkembangan setiap tahunnya sejak tahun 2017 hingga 2020 dengan terus melakukan pengembangan program dan kerjasama dalam menyelesaikan diskriminasi pada wanita di RDK.

Non-Government Organization

Non-governmental organizations (NGOs) saat ini diakui sebagai aktor sektor ketiga utama pada segi pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan, dan banyak bidang aksi publik lainnya, seperti upaya rekonstruksi pasca tsunami 2004 di Indonesia, India, Thailand, dan Sri Lanka, hingga kampanye 2005 Make Poverty History untuk bantuan, reformasi perdagangan dan pembatalan utang negara berkembang. Seperti yang diilustrasikan oleh dua contoh ini, NGO biasanya melakukan kegiatan yang terkait dengan sosial dan kampanye pada publik mengenai transformasi sosial. NGO juga berperan dalam resolusi konflik, pekerjaan hak asasi manusia, analisis kebijakan, pembangunan demokrasi, aktivisme lingkungan serta penyedia informasi.

Sementara NGO mengambil bentuk yang berbeda di berbagai konteks ini, ada pondasi yang tetap menjadi inti dari upaya orang untuk berorganisasi di sektor ketiga. Di satu sisi adalah kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan, mengamankan hak atau menuntut layanan. Disisi lain, untuk manfaatkan peluang baru yang muncul dalam bentuk hubungan dengan organisasi dan sumber daya luar, paparan ide-ide baru, dan perubahan politik yang terbuka serta membangun ruang organisasi baru.

Organisasi internasional umumnya terbagi menjadi dua, yaitu Inter-Governmental Organizations (IGO) atau sering disebut sebagai organisasi antar pemerintah. Contohnya United Nations(UN) serta World Trade Organizations (WTO). Kategori kedua adalah Non-Governmental Organizations (NGO) atau sering disebut dengan organisasi non pemerintah yang didalamnya berisikan kelompok swasta yang berasal dari berbagai bidang, contohnya adalah Greenpeace, PMI, dan juga WWF.

Peran UN sebagai Organisasi Internasional

Dunia NGO mengandung berbagai label yang cukup membingungkan. Sementara istilah "NGO" yang saat ini digunakan secara luas, ada juga lainnya yang digunakan seperti "organisasi nonprofit," "sukarela," dan "masyarakat sipil". Dalam banyak kasus, penggunaan istilah yang berbeda tidak mencerminkan ketelitian deskriptif atau analitis, tetapi merupakan konsekuensi dari budaya dan sejarah yang berbeda di mana pemikiran tentang NGO telah muncul. Misalnya, "organisasi non profit" sering digunakan di AS, di mana

pasarnya dominan, dan dimana organisasi warga dihargai dengan keuntungan fiskal jika mereka menunjukkan bahwa mereka bukan entitas komersial, mencari keuntungan dan bekerja untuk kepentingan publik. Di Inggris, "organisasi sukarela" atau "amal" umum digunakan, mengikuti tradisi panjang kerja sukarela yang terdapat pada nilai-nilai Kristen dan perkembangan hukum amal. Akhirnya, akronim "NGO" cenderung digunakan dalam kaitannya dengan pekerjaan internasional atau "negara berkembang", karena asalnya terletak pada pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945, ketika sebutan "organisasi non-pemerintah" diberikan kepada organisasi non-negara internasional tertentu yang diberi status konsultatif dalam kegiatan PBB.

Transnational Advocacy Network

Berdasarkan konsep Transnational Advocacy Network (TAN) ada tujuh aktor utama yang bisa berkontribusi, yakni NGO, yayasan, media, pelaku aktivitas perdagangan dan peneliti, local social movements, badan eksekutif atau parlemen pemerintahan, serta bagian organisasi regional.

Dari beberapa aktor tersebut sudah bisa terbentuk suatu Jaringan Advokasi Transnasional. Diantara aktor – aktor tersebut, yang memiliki peran terbesar adalah pemerintah, pelaku aktivitas dan local social movements. Aktor – aktor lain seringkali mengalami hambatan untuk bergabung dalam politik domestik suatu negara atau pemerintahan. Sehingga mereka menggunakan jaringan internasional sebagai relasi untuk membantu persoalan yang tersebut, yang selanjutnya disebut "Boomerang" pattern.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa UN Women sebagai NGO mempunyai peran untuk mengentaskan diskriminasi yang terjadi di RDK selama 2017-2020 meskipun belum sepenuhnya hilang. Selain itu, sebagai NGO dengan fungsinya sebagai TAN, UN Women menggunakan empat strategi yaitu pertama Information Politics, yang berperan menyebarkan pemahaman mengenai emansipasi dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di RDK. Kedua, Symbolic Politics merupakan salah satu contoh yang dilakukan oleh UN Women dengan menghadiri seluruh rapat dan pertemuan dalam advokasi isu gender. Ketiga, Leverage Politics yaitu UN Women memperkuat diri dengan menggandeng pemerintah lokal dalam mendukung program pemberdayaan wanita. Keempat, Accountability Politics yang berarti UN Women terus mengikuti perkembangan di setiap tahunnya sejak tahun 2017 hingga 2020 dengan terus melakukan perkembangan program dan kerjasama dalam menuntaskan diskriminasi pada wanita di RDK.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, A.V, 'Peran UNWomen Dalam Mengatasi Kekerasan Wanita Di Republik Demokratik Congo Tahun 2011-2018', *Ejournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2019
- Bashwira, Marie-Rose, and Jeroen Cuvelier, 'Women, Mining and Power in Southeastern Democratic Republic of Congo: The Case of Kisengo', *The Extractive Industries and Society*, 6.3 (2019), 960-67 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.02.010>>
- Chamboko, Richard, Robert Cull, Xavier Giné, Soren Heitmann, Fabian Reitzug, and Morne Van Der Westhuizen, 'The Role of Gender in Agent Banking: Evidence from the Democratic Republic of Congo', *World Development*, 146.105551 (2021), 1-14 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105551>.>
- Geenen, Sara, Gracia Kabilambali, Fiz Mussa Bashizi, and Elisa Vanlerberghe, 'Women Who "Age Too Fast": Female Work, Bodies and Health in the Gold Mines of Eastern Democratic Republic of Congo', *The Extractive Industries and Society*, 12.101138 (2022), 1-15 <<https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101138>>
- Keck, M, and K Sikkink, *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* (New York: Cornell University Press, 1998)

- Keyser, Laura, Raha Maroyi, and Denis Mukwege, 'Violence Against Women – A Global Perspective', *Obstetrics and Gynecology Clinics of North America*, 49.4 (2022), 809–21 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ocg.2022.08.002>>
- Kharimah, R. M., 'Peran United Nations Women Dalam Penanganan Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Republik Demokratik Kongo Periode 2015-2017' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)
- Lewis, D, *Nongovernmental Organizations, Definition and History* (London School of Economics and Political Science, 2022)
- Shamimi, Z, N. K Rijal, and M. A. Aufiya, 'Efektivitas UN Women Meningkatkan Gender Equality Di Afghanistan Dalam Pelaksanaan Afghanistan Sustainable Development Goals (ASDG's)', *IDJ*, 3.01 (2022), 1–15
- UNWomen, 'About. Retrieved from UN Women', 2022 <<https://www.unwomen.org/en/about-us/about-unwome>>
- , 'News Announcement', 2017 <<https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/7/announcement-joint-un-au-delegation-visits-RDK>>
- , 'UN Women Africa. Retrieved from News and Event.', 2020 <<https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/09/RDK-takes-a-step-towards-zero-tolerance-against-gender-based-violence>>
- , 'UN Women Africa', 2020 <https://africa.unwomen.org/sites/default/files/Field_Office_Africa/Images/Publications/2021/01/WCARO_AR/20201218_UNWOMEN_WCARO_annual_layout_02_web_spread.pdf>
- , 'UN Women Year In Review 2017', 2017 <<https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/yearinreview/2017/en/index.html>>